



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN  
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Tinggi Utama, adalah pimpinan unit organisasi Eselon I pada satuan kerja pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
2. Pimpinan Tinggi Madya, adalah pimpinan unit organisasi Eselon II pada unit organisasi Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dekonsentrasi, adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
4. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Dana Dekonsentrasi, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6. Dana Tugas Pembantuan, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

8. Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala SKPD pada SKPD yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
9. Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada SKPD Pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015.
14. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2015.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, yaitu tahun 2015.

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
17. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

### Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

### Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Penugasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
- (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai RKP, Renja-KL, dan RKA-KL.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan hubungan pusat dan daerah; dan
- b. mengoptimalkan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 7

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
- b. meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, dan pemantapan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan keberdayaan serta kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan keserasian dan pengendalian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan; dan
- e. meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum/publik pemerintahan.

### BAB IV PROGRAM DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Kemendagri;

- b. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
  - b. Program Bina Pembangunan Daerah;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
  - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
- a. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan
  - b. Program Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

### BAB V

#### KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan tinggi utama pembina, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Pimpinan Tinggi Utama Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan

rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan Pimpinan Tinggi Madya dan para kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

- (3) Pimpinan Tinggi Madya Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), gubernur dan bupati/walikota:
  - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
  - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggung-jawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri di wilayahnya dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian, pelaporan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.



## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 15

- (1) Kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD provinsi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur kepada menteri.

### Pasal 16

- (1) Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada menteri.

### Pasal 17

Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Gubernur menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan tugas pembantuan dengan Keputusan Menteri
- (2) Penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan gubernur dan bupati/walikota yang menerima penugasan.
- (3) Penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Utama Pembina atas nama menteri.

### Pasal 20

Pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PP-SPM; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 21

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (2) Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

#### Pasal 22

Gubernur dapat mendelegasikan kepada KPA untuk menunjuk dan menetapkan PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d.

#### Pasal 23

Menteri mendelegasikan kepada KPA untuk menunjuk dan menetapkan PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c dan huruf d.

#### Pasal 24

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) memuat tugas dan tanggung jawab KPA antara lain:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri; dan
- b. menyusun rencana penarikan anggaran berdasarkan RKA-K/L dan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Utama Pembina.
- (3) Penetapan Petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan kepada gubernur, bupati

dan walikota, dan kepala SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Penyampaian petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 2 minggu setelah ditetapkannya Keputusan Menteri.

#### Pasal 27

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Utama Pembina, Sekretariat Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 28

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang telah ditetapkan dalam DIPA.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan, dapat dilakukan revisi anggaran apabila terdapat perubahan:
  - a. Penambahan atau pengurangan termasuk pergeseran pada rincian anggarannya;
  - b. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
  - c. Ralat karena kesalahan administrasi;
  - d. Perubahan atas APBN;
  - e. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau
  - f. Kebijakan prioritas pemerintah lainnya yang telah ditetapkan.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Tinggi Utama Pembina.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGELOLAAN REKENING DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, SKPD pelaksana melakukan pembukaan rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Utama Pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam rangka penertiban rekening, pembukaan 1 (satu) rekening dilakukan untuk 1 (satu) DIPA.
- (4) Dalam hal rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sudah tidak digunakan sesuai peruntukannya, SKPD pelaksana harus memproses penutupan rekening dengan mengajukan permohonan penutupan rekening kepada pihak bank dan melaporkan kepada Pimpinan Tinggi Utama Pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 31

Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan manajerial dan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### Pasal 32

- (1) KPA dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan dan laporan barang milik negara.

### Pasal 33

Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, gubernur dan bupati/walikota menyusun laporan tahunan

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan konsolidasi atas laporan manajerial yang disusun oleh kepala SKPD pelaksana kegiatan.

## BAB IX BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

### Pasal 35

- (1) Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik Negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan ke daerah.
- (3) Tata cara hibah barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. fasilitasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bimbingan teknis; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI  
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015  
UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp 4,852,808,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 728,000,000	
	c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 288,414,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 133,920,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 436,950,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 109,934,000	
	d. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 915,590,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,000,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 600,000,000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 4,186,341,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 273,900,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 652,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 153,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 268,956,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 170,270,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 610,670,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 99,980,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 822,565,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 800,000,000	
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 4,960,036,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		DITJEN BINA BANGDA
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 229,100,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 637,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 460,000,000	
	b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 261,322,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 109,760,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 363,230,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 96,606,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 853,018,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 450,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 400,000,000	
4.	PROVINSI RIAU	Rp 5,264,436,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT



NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		DITJEN BINA BANGDA
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 640,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		DITJEN PMD
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 254,672,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 89,755,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 247,730,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 474,490,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 95,122,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		DITJEN PUM
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 852,667,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 400,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 650,000,000	
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan dan PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG dan RI-RDTL	Rp 450,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 275,000,000	
	5 PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 4,906,650,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 678,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 293,322,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 73,180,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 165,970,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 438,340,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 104,088,000	DITJEN PUM
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 858,750,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Fasilitas dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 450,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 500,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 700,000,000	
6	PROVINSI JAMBI	Rp 4,905,933,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		BADAN DIKLAT
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		DITJEN BINA BANGDA
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 643,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 262,102,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 82,440,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 223,260,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 97,180,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN BINA
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 727,951,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 450,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 950,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 525,000,000	
7	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp 9,648,359,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		DITJEN BINA
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		BANGDA
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 647,000,000	
	c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 287,922,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 97,300,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 301,158,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 4,912,032,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 102,476,000	
	d. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 772,471,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,100,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 733,000,000	
	8. PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp 3,658,802,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 662,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 284,590,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 69,680,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 164,590,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 462,440,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 100,948,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 814,554,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	2) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
9	PROVINSI BENGKULU	Rp 3,911,396,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 670,000,000	
	2) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana		DITJEN PMD
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 200,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		DITJEN PUM
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 285,218,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 78,725,000	DITJEN PMD
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 217,428,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	DITJEN PUM
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 110,442,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 914,583,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		DITJEN PUM
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	DITJEN PUM
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 250,000,000	
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp 4,897,170,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 642,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		DITJEN PMD
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 200,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 295,442,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 97,300,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 276,038,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 103,162,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,038,228,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 1,200,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 400,000,000	
11.	PROVINSI BANTEN	Rp 3,898,538,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 695,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 307,788,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 71,295,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 175,874,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 102,652,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 725,929,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 325,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp 712,414,000	
	a. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 80,000,000	
	b. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 632,414,000	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp 15,699,252,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 241,500,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 689,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 575,000,000	
	b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 325,230,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 141,880,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 443,182,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 9,966,978,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 106,530,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 916,952,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 450,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 450,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 553,000,000	
14	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 6,302,230,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 235,200,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 632,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 490,000,000	
	b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 255,372,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 171,600,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 545,530,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 96,944,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 870,584,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 550,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 200,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 950,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 720,000,000	
15	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp 5,202,967,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 698,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 470,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 288,837,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 60,150,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 123,480,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 467,340,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 96,854,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 808,306,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 350,000,000	
	2) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,000,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 250,000,000	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 13,447,690,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 270,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 279,600,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 672,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 582,000,000	
	b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 350,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 267,909,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 182,745,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 596,470,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 6,292,328,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 450,470,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 98,008,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 801,160,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 950,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 1,025,000,000	



NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
17.	PROVINSI BALI	Rp 5,099,465,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 846,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 427,270,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 75,010,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 220,718,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 135,396,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,000,071,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 450,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 925,000,000	
18	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 14,316,375,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 212,800,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 650,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 285,342,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 97,785,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 290,790,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 9,498,003,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 200,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		DITJEN PUM
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 99,026,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 824,629,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan	Rp 500,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 600,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 478,000,000	
19	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp 13,890,621,000	SETJEN
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	BADAN DIKLAT
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 205,900,000	DITJEN BINA BANGDA
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 707,000,000	DITJEN PMD
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 277,100,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 104,785,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 293,110,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 8,170,246,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 100,758,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 761,722,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 400,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 750,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 900,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 875,000,000	
20	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 3,881,937,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 201,800,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 709,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 338,885,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 93,770,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 266,090,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 570,880,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 115,574,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 709,938,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 231,000,000	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp 4,441,379,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 731,000,000	
	c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 292,829,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 95,755,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 299,430,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 474,650,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 106,110,000	
	d. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 654,105,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan	Rp 500,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 532,500,000	
22	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp 10,339,513,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 233,200,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 715,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 319,350,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 109,300,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 303,830,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 4,365,338,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 486,540,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 112,286,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,029,669,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 975,000,000	
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 400,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 400,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 425,000,000	
23	PROVINSI GORONTALO	Rp 8,198,667,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 690,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 360,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 335,120,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 65,665,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 152,670,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 3,857,744,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		DITJEN PUM
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 118,888,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 828,580,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 275,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 550,000,000	
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 5,575,964,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 218,600,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 677,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 175,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 276,008,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 89,755,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 226,150,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 493,770,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		DITJEN PUM
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 102,874,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 846,807,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 625,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,050,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 275,000,000	
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 7,852,485,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 200,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 666,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 185,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 254,194,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 65,665,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 127,750,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 3,455,815,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 96,038,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 982,023,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 750,000,000	
26	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 5,301,321,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	BADAN DIKLAT
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 212,000,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 689,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 225,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 277,636,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 93,770,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 248,270,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 101,176,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 884,469,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 700,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 1,050,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 300,000,000	
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp 7,184,495,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 259,100,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 766,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 450,000,000	
	b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 250,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 366,065,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 137,935,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 460,678,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 580,690,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 122,584,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,001,443,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 1,000,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 500,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 770,000,000	
28	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 14,101,563,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 223,700,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 789,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 330,540,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 86,725,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 217,010,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 8,733,022,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 107,146,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,023,920,000	
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp 400,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 850,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 650,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 235,500,000	
29	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 18,300,716,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN



NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		BADAN DIKLAT
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 280,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 259,100,000	DITJEN BINA BANGDA
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 735,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 305,635,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 151,905,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 407,890,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 12,341,537,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 100,486,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,004,163,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 600,000,000	
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 700,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 900,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 450,000,000	
30	PROVINSI MALUKU	Rp 9,484,326,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	BADAN DIKLAT
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 232,700,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 731,000,000	DITJEN PMD
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 300,232,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 93,440,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 235,174,000	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp 4,394,167,000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 230,000,000	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 108,274,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 894,339,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 675,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 550,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 750,000,000	
31	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp 5,281,719,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 234,300,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 654,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 271,160,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 91,725,000	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 198,950,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 175,000,000	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp 450,390,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 105,416,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 1,060,778,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 250,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 800,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 700,000,000	
32	PROVINSI PAPUA	Rp 5,561,933,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 275,200,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 792,000,000	
	2) Kegiatan Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan hidup di Daerah		
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp 300,000,000	
	b) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp 300,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 390,281,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 201,510,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 629,410,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 131,316,000	
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 712,216,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 300,000,000	
	b) Dekonsentrasi Fasilitas dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp 500,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 375,000,000	
33	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 4,066,590,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI		SETJEN
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp 290,000,000	
	b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan		
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 272,300,000	
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 751,000,000	
	d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 329,278,000	DITJEN PMD
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 113,270,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 230,750,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 65,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 109,586,000	DITJEN PUM
	e. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah		
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp 855,406,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp 750,000,000	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp 300,000,000	
34	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 2,225,039,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 717,000,000	
	b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp 295,979,000	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp 64,150,000	
	b) Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp 299,770,000	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp 120,000,000	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		
	a) Fasilitas Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 106,140,000	
	c. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp 622,000,000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015  
UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp 2,120,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Subulussalam	Rp 1,400,000,000	
	b. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Pidie Jaya	Rp 720,000,000	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp 2,150,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 1,400,000,000	
	b. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 750,000,000	
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp 5,195,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Pariaman	Rp 1,300,000,000	
	b. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Solok	Rp 500,000,000	
	- Kab. Solok Selatan	Rp 240,000,000	
	- Kab. Tanah Datar	Rp 425,000,000	
	- Kab. Padang Pariaman	Rp 300,000,000	
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp 330,000,000	
	b) Fasilitas Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Solok	Rp 900,000,000	
	- Kab. Tanah Datar	Rp 600,000,000	
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp 600,000,000	
4.	PROVINSI RIAU	Rp 2,700,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Rokan Hulu	Rp 1,300,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Meranti	Rp 1,400,000,000	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 2,150,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Bintan	Rp 500,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	- Kab. Kep. Anambas	Rp 1,000,000,000	
	- Kab. Karimun	Rp 650,000,000	
6.	PROVINSI BENGKULU	Rp 1,600,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Lebong	Rp 1,300,000,000	
	b. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Lebong	Rp 300,000,000	
7.	PROVINSI LAMPUNG	Rp 260,000,000	
	a. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Lampung Barat	Rp 260,000,000	
8.	PROVINSI BANTEN	Rp 600,000,000	
	a. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Serang	Rp 600,000,000	
9.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp 6,645,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Kuningan	Rp 1,300,000,000	
	b. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Kuningan	Rp 1,580,000,000	
	- Kab. Cianjur	Rp 950,000,000	
	- Kab. Cirebon	Rp 630,000,000	
	- Kab. Indramayu	Rp 760,000,000	
	- Kab. Bandung	Rp 325,000,000	
	b) Fasilitas Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Kuningan	Rp 1,100,000,000	
10.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp 9,155,000,000	
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Cilacap	Rp 1,100,000,000	
	b. PROGRAM BINA Pembangunan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Cilacap	Rp 435,000,000	
	- Kab. Brebes	Rp 885,000,000	
	- Kab. Pemasang	Rp 780,000,000	
	- Kab. Kendal	Rp 680,000,000	
	- Kota Semarang	Rp 995,000,000	
	- Kab. Semarang	Rp 580,000,000	
	- Kab. Magelang	Rp 215,000,000	
	- Kab. Sragen	Rp 530,000,000	
	- Kab. Boyolali	Rp 535,000,000	
	- Kab. Grobogan	Rp 520,000,000	
	- Kab. Karanganyar	Rp 1,000,000,000	
	b) Fasilitas Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Sragen	Rp 900,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
11	PROVINSI D.I YOGYAKARTA	Rp 2,415,000,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Sleman	Rp 450,000,000	
	- Kab. Kulon Progo	Rp 350,000,000	
	- Kab. Bantul	Rp 765,000,000	
	- Kab. Gunung Kidul	Rp 850,000,000	
12.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 6,625,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Tuban	Rp 1,500,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Bangkalan	Rp 215,000,000	
	- Kab. Bondowoso	Rp 515,000,000	
	- Kab. Probolinggo	Rp 420,000,000	
	- Kab. Blitar	Rp 490,000,000	
	- Kab. Jember	Rp 437,000,000	
	- Kab. Ngawi	Rp 348,000,000	
	b) Fasilitas Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Probolinggo	Rp 900,000,000	
	- Kab. Situbondo	Rp 600,000,000	
	- Kab. Malang	Rp 600,000,000	
	- Kab. Pacitan	Rp 600,000,000	
13.	PROVINSI BALI	Rp 350,000,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Karangasem	Rp 350,000,000	
14.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 6,090,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Sambas	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Bengkayang	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp 2,200,000,000	
	- Kab. Sanggau	Rp 890,000,000	
15.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp 1,400,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Tanah Bumbu	Rp 1,400,000,000	
16.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp 4,200,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Bitung	Rp 1,100,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau		
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 2,000,000,000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
17.	PROVINSI GORONTALO	Rp 1,480,000,000	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Boalemo	Rp 535,000,000	
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp 350,000,000	
	- Kab. Gorontalo	Rp 265,000,000	
	- Kab. Bone Bolango	Rp 330,000,000	
18.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp 3,435,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Morewali	Rp 1,400,000,000	DITJEN BINA BANGDA
	- Kab. Sigi	Rp 1,400,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Donggala	Rp 635,000,000	
19.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp 2,355,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Polewali Mandar	Rp 1,300,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Majene	Rp 1,055,000,000	
20.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 1,710,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kota Kendari	Rp 1,100,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Muna	Rp 610,000,000	
21.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp 8,235,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Luwu Utara	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Wajo	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Maros	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Bantaeng	Rp 1,100,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Maros	Rp 950,000,000	
	- Kab. Pinrang	Rp 620,000,000	
	- Kab. Bone	Rp 615,000,000	
	- Kab. Bulukumba	Rp 750,000,000	
	b) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Bantaeng	Rp 900,000,000	
22.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 1,400,000,000	
	a. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM



NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Bima	Rp 1,400,000,000	
23.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 6,910,000,000	DITJEN PUM
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	1) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Prov. Nusa Tenggara Timur	Rp 210,000,000	
	- Kab. Kupang	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp 1,100,000,000	
	- Kab. Malaka	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Alor	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Belu	Rp 1,100,000,000	
24.	PROVINSI MALUKU	Rp 1,000,000,000	DITJEN PUM
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp 1,000,000,000	
25.	PROVINSI PAPUA	Rp 8,520,000,000	DITJEN PUM
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	1) Kegiatan Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana		
	- Kab. Lanny Jaya	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Nabire	Rp 1,400,000,000	
	2) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		DITJEN BINA BANGDA
	- Prov. Papua	Rp 1,500,000,000	
	- Kab. Merauke	Rp 1,350,000,000	
	- Kota Jayapura	Rp 1,000,000,000	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	1) Kegiatan Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah		
	a) Fasilitas Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		
	- Kab. Merauke	Rp 870,000,000	
	b) Fasilitas Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat		
	- Kab. Merauke	Rp 900,000,000	
26.	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp 2,500,000,000	DITJEN PUM
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	1) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
	- Kab. Raja Ampat	Rp 2,500,000,000	
27.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 1,500,000,000	DITJEN PUM
	a. PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	1) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau		
	- Kab. Nunukan	Rp 1,500,000,000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.